

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT *Kabupaten Bondowoso* 2018



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONDOWOSO

— INDIKATOR —
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kabupaten Bondowoso
— 2018 —



**Indikator Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Bondowoso
2018**

ISSN	: -
No. Publikasi	: 35115.1929
Katalog	: 41020004.3511
Ukuran Buku	: 21 Cm x 29,7 Cm
Jumlah Halaman	: x + 53
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Penyunting	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Desain Kover	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Ilustrasi Kover	: Salah Satu Indikator Kesejahteraan Rakyat
Diterbitkan Oleh	: BPS Kabupaten Bondowoso

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BONDOWOSO 2018

Pengarah

Hartono, S.Si., M.T.

Penanggung Jawab

Agus Bedjo, SST

Penyunting

Agus Bedjo, SST

Penulis dan Pengolah Data

Lucy Efendi, SST

Desain Layout

Lucy Efendi, SST

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2018” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dinas/instansi di Kabupaten Bondowoso. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, PDRB dan Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan .

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Bondowoso, Desember 2019

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bondowoso**

Hartono, S.Si., M.T.
NIP. 19661228 199403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
 I. PENDAHULUAN.....	 2
1.1 Umum.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Sumber Data.....	4
1.5 Sistematika Penyajian.....	4
 II. KEPENDUDUKAN.....	 6
2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	7
2.2 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk.....	8
2.3 Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>).....	9
2.4 Fertilitas.....	10
2.5 Penggunaan Alat Kontrasepsi.....	13
 III. KESEHATAN DAN GIZI.....	 17
3.1 Sarana Kesehatan.....	17
3.2 Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB).....	18
3.3 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan.....	20
3.4 Penolong Kelahiran.....	21
3.5 Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	22
3.6 Imunisasi Balita.....	23
 IV. PENDIDIKAN.....	 26
4.1 Fasilitas Pendidikan.....	27

4.2 Partisipasi Sekolah.....	28
4.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan.....	29
4.4 Angka Melek Huruf (AMH).....	30
4.5 Harapan lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.....	31
4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	33
 V. BALITA.....	 36
 VI. PERUMAHAN.....	 41
6.1 Status Kepemilikan dan Keterangan Bangunan Tempat Tinggal.....	41
6.2 Keterangan Sumber Air Minum.....	42
6.3 Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak.....	43
 VII. INDIKATOR LAINNYA.....	 46
7.1 Pengeluaran Penduduk.....	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2018.....	7
Tabel 2.2 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bondowoso Per Kilometer Persegi, 2011-2018.....	9
Tabel 2.3 Persentase Penduduk Bondowoso Menurut Kelompok Umur Produktif dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2018.....	10
Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.....	11
Tabel 2.5 Persentase Penduduk Perempuan Berusia 10 tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2017-2018.....	12
Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, Tahun 2018.....	15
Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.....	18
Tabel 3.2 Persentase Perempuan Kawin usia 15-49 Tahun dan Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2018.....	22
Tabel 4.1 Rasio Murid Kelas dan Rasio Murid Guru Tahun 2017-2018.....	27
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.....	31
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Partisipasi Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (%)......	33

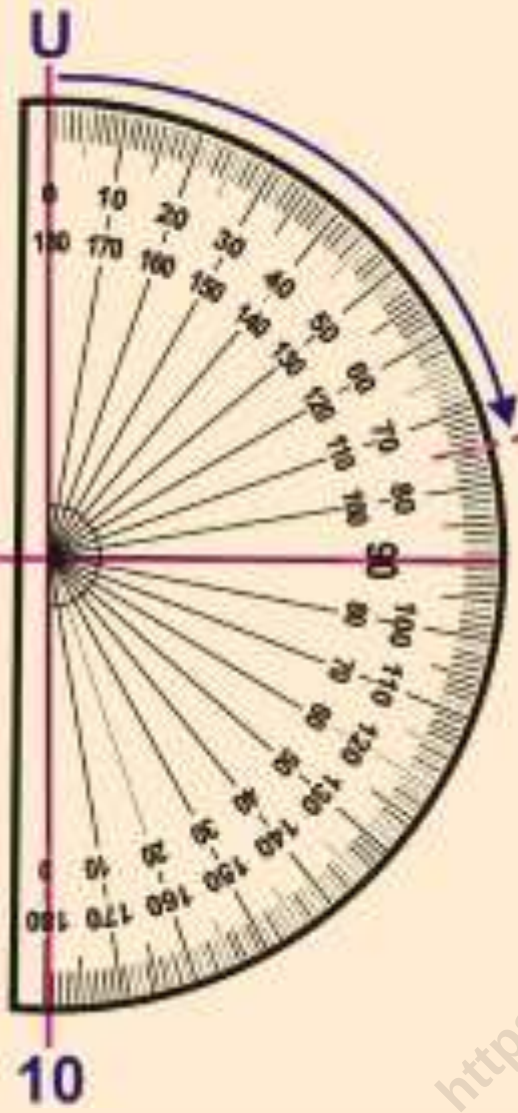
Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Atap, Dinding dan Lantai Terluas, 2018.....	42
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Air Minum, 2018.....	43
Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Penerangan, 2018.....	43
Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Bahan Bakar Utama Memasak, 2018.....	44
Tabel 7.1 Rata-Rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso 2018.....	48
Tabel 7.2 Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso 2018.....	49

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Yang Dilahirkan (persen) 2017.....	13
Grafik 3.1 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bondowoso 2011-2018 (tahun).....	19
Grafik 3.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Persentase Gangguan Sakit dan Persentase Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Yang Lalu, 2018.....	20
Grafik 3.3 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan dan Lama Pemberian ASI di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2015-2017.....	23
Grafik 3.4 Hasil Imunisasi (IMUN) Menurut Jenis Imunisasi Kabupaten Bondowoso, 2018.....	24
Grafik 4.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas.....	29
Grafik 4.2 Persentase Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bondowoso 2018.....	30
Grafik 4.3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2018.....	32
Grafik 5.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Sebelum 2 Tahun yang Lalu, 2018.....	36
Grafik 5.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun dan Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir, 2018..	37
Grafik 5.3 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) di Bondowoso Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Pemberian ASI, 2017.....	37
Grafik 5.4 Persentase Balita di Bondowoso Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi yang Didapatkan, 2017.....	39

Grafik 6.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Rumah Yang Ditempati, 2018.....	41
Grafik 7.1 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2018.....	47

<https://bondowosokab.bps.go.id>



BAB 1

<https://bondowoskab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian hal tersebut harus dilaksanakan perbaikan dan peningkatan berbagai program baik itu dibidang sosial, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Upaya tersebut tentunya harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar pembangunan di tahap berikutnya dapat berhasil dan lebih terarah. Namun hal tersebut tentunya tidak akan dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung data yang benar dan baik guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan Indonesia kedepan.

Program pembangunan di Indonesia terutama di bidang sosial yang dilakukan pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan penduduk. Dalam hal ini, sasaran dari program pembangunan adalah penduduk atau kelompok-kelompok penduduk sebagai subjek sekaligus objeknya. Melihat dari tujuan program, maka sasaran program dapat dibedakan atas perorangan, misalnya untuk meningkatkan status gizi balita, tingkat pendidikan (bersifat individu) dan untuk keluarga misalnya adalah program peningkatan pendapatan keluarga.

Keberhasilan suatu program dengan sendirinya tergantung dari sasaran program, yaitu perorangan dan keluarga, untuk memilih apakah akan berpartisipasi dalam suatu program pembangunan. Faktor luar yang juga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan perorangan dan keluarga dalam menanggapi program pembangunan yang ditujukan pada mereka adalah faktor masyarakat (berupa keadaan lingkungan, prasarana fisik, tingkat perekonomian komunitas, dan faktor budaya setempat), faktor kegiatan sektor swasta, dan faktor-faktor sosial ekonomi dan demografi dari perorangan dan keluarga.

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Bondowoso 2018 ini merupakan kumpulan berbagai macam data statistik yang dipilih untuk memberikan gambaran tentang perkembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini.

Tidak semua indikator kesejahteraan rakyat dapat digambarkan disini, mengingat begitu kompleksnya dimensi sosial masyarakat dan tidak semua data yang tersedia dapat dikuantitatifkan. Untuk itu penyajian Inkesra Kabupaten Bondowoso ini akan mencakup data yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pembangunan (*output indikator*), dan dilengkapi dengan berbagai data lainnya yang tercakup dalam indikator input (*input indikator*) dan indikator proses (*process indikator*).

1.2. Maksud dan Tujuan

Berbagai data-data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan Inkesra disini menjadi komponen yang sangat penting sebagai tolok ukur untuk melihat dan menyusun rencana pembangunan kedepannya. Dalam tugasnya melaksanakan kegiatan statistik di berbagai bidang, Badan Pusat Statistik bertanggung jawab atas tersedianya data secara berkesinambungan guna melengkapi tujuan tersebut. Peran data disini sangatlah penting, karena dengan data hasil-hasil pembangunan dapat dilihat dan dievaluasi. Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Bondowoso ditinjau dari 7 aspek baik dari kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, serta Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan.

Tujuan yang ingin dicapai disini adalah memberikan gambaran dan bahan masukan serta evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan untuk tahun-tahun selanjutnya. Kebutuhan data kesejahteraan rakyat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesempatan kerja.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Inkesra Kabupaten Bondowoso tahun 2018 ini meliputi kondisi kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Kesejahteraan rakyat disini mengandung makna yang cukup luas, karena sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti PDRB per

kapita belum memadai untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan yang dimaksud. Dalam pengertian yang sangat luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara rinci. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek kesejahteraan yang dapat terukur (*measurable welfare*) saja. Oleh karena itu statistik tentang sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

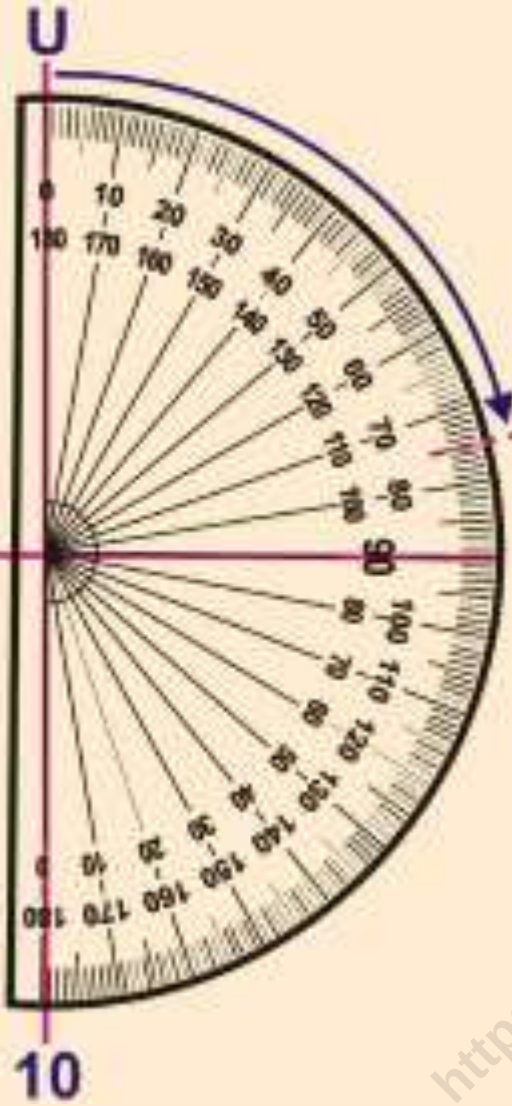
1.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2018 ini, adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso serta data sekunder, seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama serta dari beberapa instansi yang ada di Kabupaten Bondowoso.

1.5 Sistematika Penyajian

Publikasi ini ingin mencoba menyajikan informasi dalam bentuk ulasan singkat untuk memberikan suatu gambaran tentang keadaan dan perkembangan kesejahteraan rakyat sehingga bisa lebih mudah dipahami. Penyajiannya dibagi dalam enam kelompok indikator, yaitu: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, pengeluaran konsumsi, serta indeks pembangunan manusia dan kemiskinan.

BAB 2



<https://bondowosukab.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dalam program pembangunan. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun disisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Pembangunan manusia dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Penitikberatan pada kualitas SDM diperlukan karena penduduk yang besar hanya akan dapat menjadi aset pembangunan jika “kualitasnya” (dilihat dari derajat kesehatan dan atau tingkat pendidikan) cukup baik. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya merupakan beban pembangunan jika berkualitas rendah apabila dilihat dari komposisinya secara sosial dan budaya yang sangat beragam.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat

sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Ketersediaan data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	27 937	27 047	54 984	103,29
5-9	30 263	29 441	59 704	102,79
10-14	30 180	28 461	58 641	106,04
15-19	27 364	26 060	53 424	105,00
20-24	25 979	27 758	53 737	93,59
25-29	26 886	28 979	55 865	92,78
30-34	28 140	30 643	58 783	91,83
35-39	29 768	30 860	60 628	96,46
40-44	29 562	30 498	60 060	96,93
45-49	28 430	29 288	57 718	97,07
50-54	25 799	27 004	52 803	95,54
55-59	21 539	21 664	43 203	99,42
60-64	17 936	19 520	37 456	91,89
65-69	11 600	15 149	26 749	76,57
70-75	8 280	11 596	19 876	71,40
75+	6 411	12 255	18 666	52,31
2018	376 074	396 223	772 297	94,91

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2019

Tabel 2.1 menyajikan karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun

2018 sebesar 772.297 jiwa yang terdiri dari 376.074 laki-laki dan 396.223 perempuan sehingga menghasilkan Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,91 persen, yang berarti bahwa diantara 100 perempuan terdapat 93-94 laki-laki.

Dari hasil proyeksi penduduk yang dilakukan BPS Kabupaten Bondowoso terlihat bahwa distribusi penduduk menurut kelompok umur berkisar antara 4,85 persen hingga 8,45 persen atau bisa dikatakan relatif merata. Persebaran penduduk kelompok umur terbesar berada pada kelompok penduduk usia tua (usia 65 ke atas) yaitu sebanyak 8,45 persen, kemudian disusul penduduk kelompok umur 35-39 tahun yaitu sebesar 7,85 persen. Sedangkan penduduk usia 60-64 tahun hanya sebanyak 4,85 persen dari total penduduk di kabupaten Bondowoso.

Fenomena menarik terlihat dari rasio jenis kelamin per kelompok umur di Kabupaten Bondowoso, bahwa semakin meningkat usia rasio jenis kelamin cenderung menurun. Pada usia di bawah 20 tahun masih diatas 100 persen, semakin ke bawah semakin mengecil hingga hanya sebesar 52,31 persen di kelompok umur 75 tahun ke atas.

2.2 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018 berdasarkan angka proyeksi penduduk tercatat sebanyak 772.297 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan 2.385 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 yang mencapai 768.912 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,31 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bondowoso selama tujuh tahun terakhir terpantau semakin menurun yaitu dari sebesar 0,68 persen di tahun 2011 menjadi hanya sebesar 0,31 di tahun 2018. Hal ini menandakan program pengendalian penduduk secara kuantitatif mulai menunjukkan hasil yang positif. Bila dibandingkan dengan enam tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso hanya mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,44 persen.

Tabel 2.2 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bondowoso Per Kilometer Persegi, 2011-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Per Kilometer Persegi (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	772.297	0.31	495
2017	768.912	0,50	492
2016	765.094	0,51	490
2015	761.205	0,56	488
2014	756.989	0,56	485
2013	752.791	0,62	483
2012	748.127	0,64	480
2011	743.369	0,68	476

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2019

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Dengan luas wilayah Kabupaten Bondowoso sekitar 1.560,10 kilometer persegi yang didiami oleh 772.297 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso adalah sebanyak 495 orang perkilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bondowoso yakni paling sebanyak 3.154 orag per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Ijen yakni sebanyak 59 orang per kilometer persegi.

2.3 Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan Angka Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* yaitu perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) . Besarnya Angka Beban Ketergantungan ini menunjukkan beban ketergantungan ekonomi penduduk usia produktif. Semakin mengecil

angka beban ketergantungan, akan semakin baik kondisi perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Dari tabel 2.3 nampak bahwa 69,10 persen penduduk Kabupaten Bondowoso merupakan penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar 22,44 persen dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 8,45 persen.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur Produktif dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2018

Tahun	Struktur Umur			Jumlah	Angka Beban Ketergantungan
	0-14	15-64	65 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	22,44	69,10	8,45	100,00	44,71

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2019

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Bondowoso tahun 2018 sebesar 44,71 persen. Dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 44 sampai 45 orang penduduk yang tidak produktif, yang mana 32 orang diantaranya berasal dari kelompok muda (usia di bawah 15 tahun) dan 12 orang lainnya berasal dari kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun). Salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka mengurangi besarnya angka beban ketergantungan adalah dengan menekan angka kelahiran (*fertilitas*) dan menghindari usia perkawinan muda.

2.4 Fertilitas

Kelahiran (*fertilitas*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*mobilitas*). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai

macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban pemerintah semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan.

Penduduk menurut status perkawinan penting untuk diketahui karena terkait dengan tingkat fertilitas suatu daerah. Semakin besar penduduk yang berstatus kawin memungkinkan tingkat fertilitas yang tinggi di suatu daerah tersebut.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2018

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	27,92	17,31	22,44
Kawin	67,41	63,93	65,61
Cerai	4,67	18,77	5,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2018

Dari hasil Susenas 2018, Penduduk Kabupaten Bondowoso usia 10 tahun keatas berstatus kawin sebesar 65,61 persen, yang berstatus belum kawin sebesar 22,44 persen, sedangkan untuk yang berstatus cerai sebesar 5,46 persen. Berdasarkan jenis kelamin baik penduduk laki-laki maupun perempuan usia 10 tahun ke atas mayoritas berstatus kawin.

Dalam setiap penelitian tentang kependudukan khususnya tentang pertumbuhan penduduk, peneliti biasanya langsung memusatkan kepada obyek penelitian yaitu penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas. Karakteristik yang akan dilihat antara lain, status perkawinan, usia perkawinan pertama, jumlah anak yang dilahirkan dan penggunaan alat kontrasepsi. Dengan mengetahui informasi tersebut tentunya akan lebih mudah untuk merencanakan program pembangunan, khususnya di bidang kependudukan.

Usia perkawinan pertama bagi perempuan berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda (rendah usia perkawinan pertama) akan semakin besar

resiko yang dihadapi selama kehamilan maupun saat melahirkan, baik bagi ibu maupun anak. Umur perkawinan pertama seseorang juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menambah penduduk di suatu daerah, semakin muda seseorang kawin maka semakin panjang masa reproduksinya sehingga akan memberikan peluang yang sangat besar terhadap jumlah anak yang akan dilahirkan.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2017 – 2018

Umur Perkawinan Pertama (tahun)	2017	2018
(1)	(2)	(3)
< 17	51,73	45,05
17-18	25,34	21,98
19-24	19,15	27,84
25 +	3,77	5,13
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

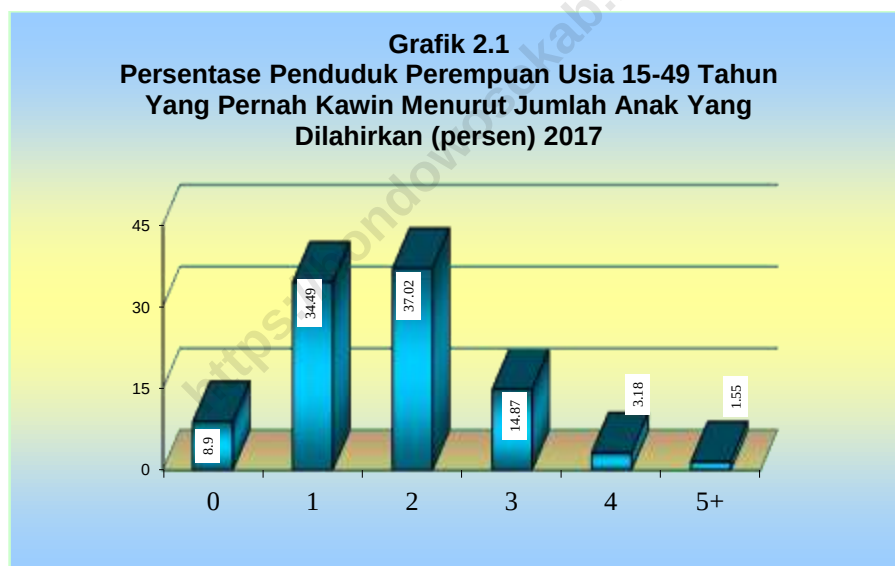
Beberapa hasil penelitian/kajian menemukan adanya pengaruh perkawinan penduduk usia dini sebagai penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Selain itu, usia perkawinan penduduk terutama perempuan yang belum cukup umur merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, serta tingginya angka perceraian terutama di pedesaan. Cukup beralasan apabila masalah perkawinan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk pada umumnya. Sebaliknya, baik buruknya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk baik secara ekonomi ataupun sosial merupakan faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya peristiwa atau kasus perceraian di kalangan penduduk.

Data menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang pernah kawin (10 tahun ke atas) di Kabupaten Bondowoso ternyata sebanyak 45,05 persen masih di bawah usia 17

tahun ketika melakukan perkawinan pertamanya. Padahal pada usia tersebut seharusnya masih menempuh pendidikan setingkat SMA. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 51,73 persen.

Berikutnya sebesar 21,98 persen perempuan yang pernah kawin melakukan perkawinan pada usia 17-18 tahun. Dan hanya sebesar 27,84 persen yang melaksanakan perkawinan pertamanya pada usia 19-24 tahun.

Grafik 2.1 menampilkan persentase penduduk perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin menurut jumlah anak yang dilahirkan tahun 2017. Ternyata sebanyak 37,02 persen diantaranya melahirkan anak lahir hidup sebanyak 2 orang dan 34,49 persen melahirkan anak lahir hidup sebanyak 1 orang. Hal ini dapat diartikan sebanyak 71,51 persen perempuan yang pernah kawin mengikuti arahan pemerintah yaitu program Keluarga Berencana (dua anak cukup)



Sumber: Susenas 2017

2.5 Penggunaan Alat Kontrasepsi

Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana (KB), disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama,

moral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Lahirnya program keluarga berencana antara lain bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran. Program seperti ini masih sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak bermakna, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk. Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan karena pada selang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar. Perempuan yang usianya berada pada periode ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangga. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga yang sejahtera

Program KB dilakukan dengan alat kontrasepsi yang jenisnya berbagai macam. Pemerintah selalu berharap cakupan akseptor KB terus mengalami peningkatan, terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, Tahun 2018

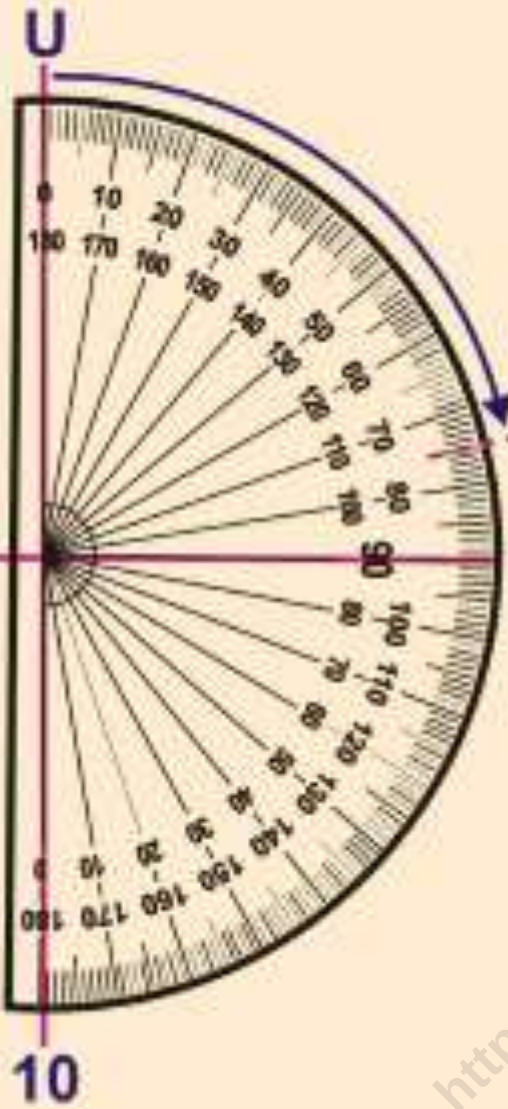
Alat Kontrasepsi/Cara KB	2018
(1)	(2)
MOW/Tubektomi	2,20
MOP/Vasektomi	1,03
AKDR/IUD/Spiral	5,93
Suntikan	58,28
Susuk KB/Norplan/Implan/ Alwalit	8,00
Pil	22,55
Kondom/Karet	1,59
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,14
Cara Tradisional	0,28

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai 71,89 persen. Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat atau cara KB yang digunakan, lebih dari separuhnya atau sekitar 58,28 memilih menggunakan suntikan. Kemudian sebesar 22,55 persen berikutnya lebih berminat dan memilih pil KB. Hanya sebesar 0,28 persen yang memilih cara tradisional.

BAB 3

<https://bondowoskab.go.id/>



BAB III

KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

3.1. Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bondowoso ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Menurut data yang kami kumpulkan melalui cara kompilasi produk administrasi yang terangkum dalam buku “Bondowoso Dalam Angka 2019” maupun mengutip dari sumber di internet, tercatat rumah sakit sebanyak 4 unit, 25 unit puskesmas, 61 unit puskesmas pembantu. Tercatat pula apotik sebanyak 21 unit, poliklinik sebanyak 11 unit. Tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bondowoso untuk tahun 2017 sebanyak 70 dokter umum, 38 dokter spesialis, 567 perawat dan 351 bidan.

Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Prasarana Kesehatan	
Apotek	21
Puskesmas	25
Puskesmas Pembantu	61
Poliklinik	11
Rumah Sakit	4
Tenaga Kesehatan	
Dokter Umum	154
Dokter Spesialis	65
Dokter Gigi	37
Perawat	561
Bidan	578
Bidan Desa	237
Dukun Bermitra	435

Sumber : Bondowoso Dalam Angka 2019

3.2. Angka Harapan Hidup (AHH)

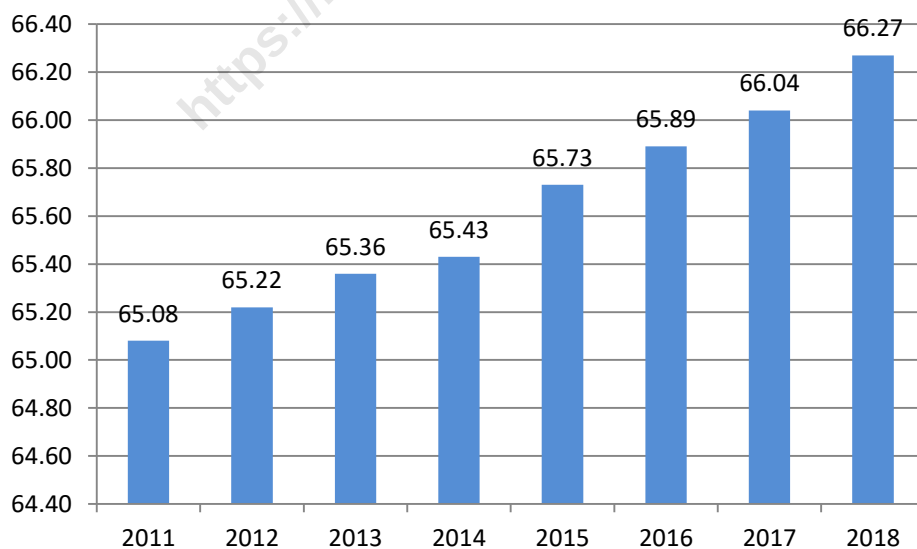
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia

harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Berdasarkan grafik 3.1 dapat dilihat bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2011 sampai 2018 terus mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2018 sebesar 66,27 tahun. Angka ini mengandung arti bahwa setiap bayi di Kabupaten Bondowoso yang lahir hidup pada tahun 2018 mempunyai harapan untuk hidup selama 66,27 tahun. Dengan adanya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bondowoso, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

Grafik 3.1 . Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bondowoso 2011-2018 (tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso 2018

3.3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. .

Grafik 3. 2 Presentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Persentase Gangguan Sakit dan Presentase Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Yang Lalu, 2018

Uraian	Jumlah
Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir (%)	
Laki-Laki	
Ada Keluhan	44,86
Tidak Ada Keluhan	55,14
Perempuan	
Ada Keluhan	46,65
Tidak Ada Keluhan	53,35
Gangguan Sakit (Keluhan Kesehatan) (%)	
Laki-Laki	
Ada Gangguan Sakit	38,58
Tidak Ada Gangguan Sakit	61,42
Perempuan	
Ada Gangguan Sakit	38,99
Tidak Ada Gangguan Sakit	61,01
Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Yang Lalu (%)	
1-3	39,59
4-6	32,63
7-29	27,78

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Berdasarkan hasil susenas 2018, sekitar 44,86 persen penduduk laki-laki di Kabupaten Bondowoso dan 46,65 persen penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan (referensi survei dalam sebulan yang lalu). Dari yang mempunyai keluhan kesehatan di atas, 38,58 persen (laki-laki) dan 38,99 persen (perempuan) mengaku mengalami gangguan sakit. Jumlah hari rawat inap dalam setahun yang lalu persentase terbesar sebanyak 1-3 hari (39,59 persen).

3.4. Penolong Kelahiran

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan *neo natal*, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di setiap desa.

Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Keberadaan tenaga medis seperti dokter dan bidan yang ditunjang dengan sarana/peralatan yang memadai, akan sangat menolong pada saat proses kelahiran. Dokter dan bidan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam proses kelahiran terutama pada saat di mana kelahiran mempunyai resiko kematian yang tinggi terhadap ibu dan anak. Sehingga diharapkan tingkat kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran dapat terus menurun.

Berdasarkan tabel 3.2 tercatat bahwa penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Bondowoso tahun 2018 di dominasi oleh tenaga kesehatan yaitu bidan sebesar 59,10 persen dan dokter kandungan sebesar 32,28 persen. Dan hanya sebesar 7,04 persen perempuan yang pernah kawin usia 15 -49 tahun menggunakan tenaga kesehatan lain sebagai penolong kelahiran terakhir pada anak lahir hidup terakhir tahun 2018.

Tabel 3.2
Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15 – 49 Tahun dan
Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir
di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2018

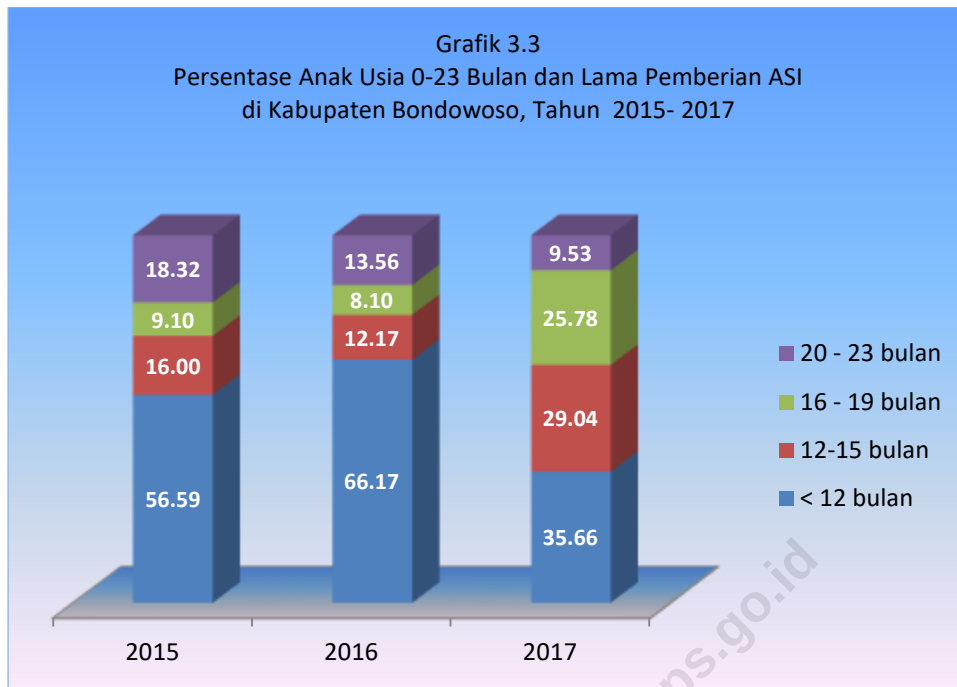
Penolong Kelahiran Terakhir	2018
(1)	(2)
Dokter Kandungan	32,28
Bidan	59,10
Perawat	1,59
Tenaga Kesehatan Lain	7,04

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

3.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, terutama pada bayi berumur 6 bulan ke bawah, selain juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk seluruh gizi bayi pada enam bulan pertama kehidupannya. Selain itu bayi yang diberi ASI memiliki kekebalan lebih tinggi terhadap penyakit. Pada umur 6-12 bulan, ASI masih merupakan makanan utama bayi, karena mengandung lebih dari 60 persen kebutuhan gizi bayi. Pemberian ASI yang ideal adalah sampai anak berumur 24 bulan.

Berdasarkan grafik 3.3 diketahui bahwa pada tahun 2017, bayi di Kabupaten Bondowoso yang disusui kurang dari 12 bulan masih cukup banyak yaitu sebesar 35,66 persen. Sedangkan 29,04 persen anak yang masih mendapatkan ASI pada umur 12 sampai 15 bulan dan sebanyak 25,78 persen anak yang mendapatkan ASI antara umur 16 – 19 bulan. Hanya sebesar 9,53 persen saja yang masih menikmati ASI hingga usia 20 – 23 bulan.



Sumber: Susenas 2015- 2017

Tingkat kesadaran akan pentingnya ASI bagi anak harus terus di sampaikan kepada masyarakat di tengah gencarnya promosi akan susu formula. Terutama pemberian informasi kepada ibu-ibu yang kegiatan utamanya bekerja, karena di tengah kesibukannya, ibu-ibu pekerja tersebut cenderung mempercayakan kebutuhan gizi anaknya dengan susu formula.

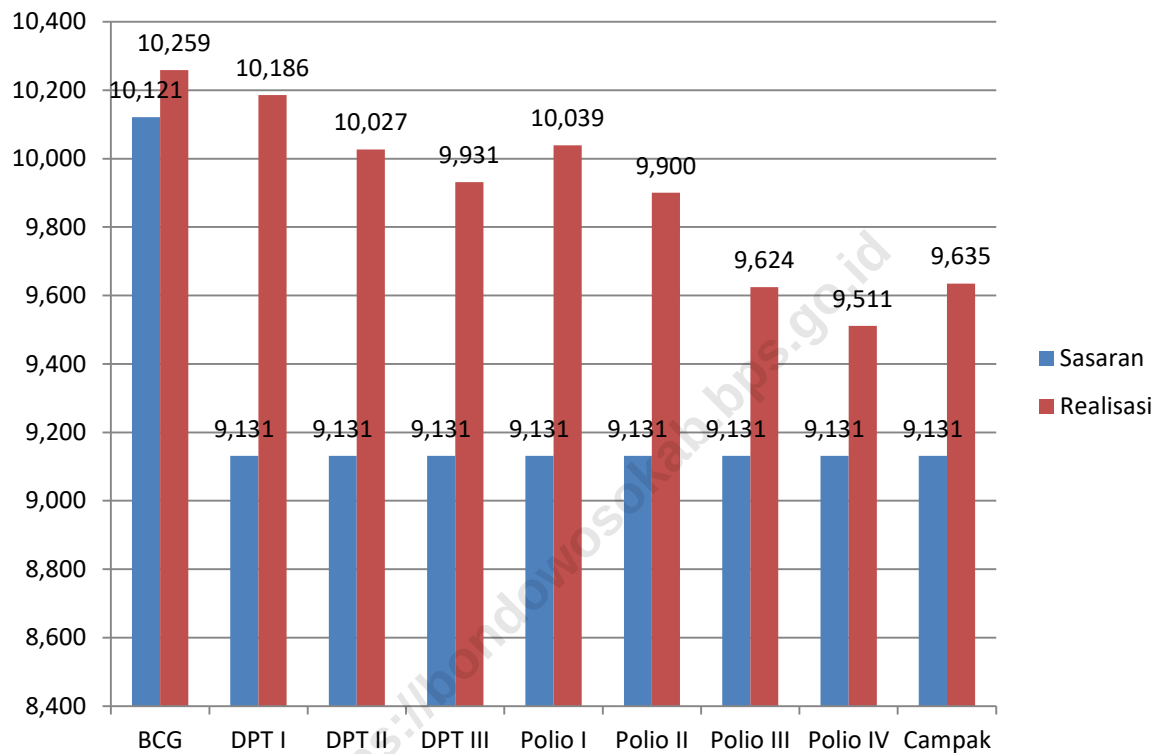
3.6. Imunisasi Balita

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak. Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut), dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Dengan imunisasi yang lengkap dan makanan yang bergizi diharapkan akan terbentuk generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas.

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang

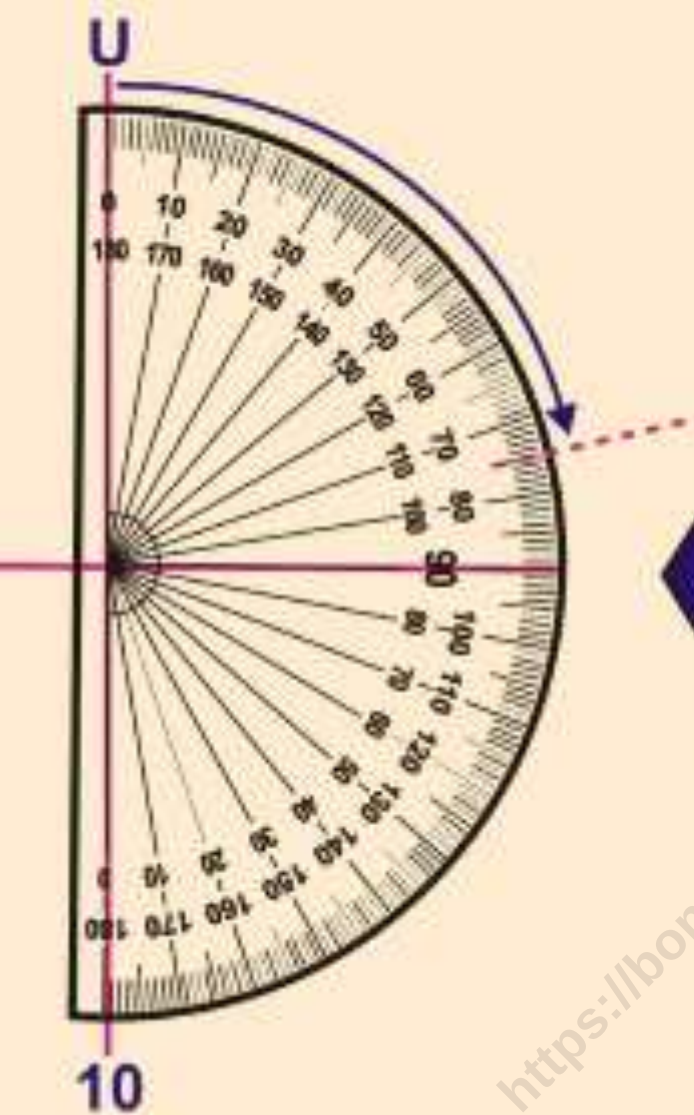
disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Grafik 3.4 Hasil Imunisasi (IMUN) Menurut Jenis Imunisasi Kabupaten Bondowoso, 2018



Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2019

Berdasarkan grafik 3.4, realisasi imunisasi pada bayi pada tahun 2018 selalu melebihi sasaran yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2018, sasaran imunisasi BCG sebanyak 10.121 bayi dengan realisasi sebanyak 10.259 bayi. Untuk imunisasi DPT I, DPT II, DPT III, Polio I, Polio II, Polio III, Polio IV, dan Campak, Dinas Kesehatan menargetkan masing-masing sebanyak 9.131 bayi, tetapi realisasi yang diperoleh masing-masing sebanyak 10.186, 10.027, 9.931, 10.039, 9.900, 9.624, 9.511, 9.635 bayi.



BAB 4

<https://bondowoskab.go.id/>

BAB IV

PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Bondowoso menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada

indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah.

4.1. Fasilitas Pendidikan

Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid guru dan rasio murid kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.

**Tabel 4.1 Rasio Murid Kelas dan Rasio Murid Guru
Tahun 2017-2018**

<i>Uraian</i>	2016	2018
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
<i>Tingkat SD sederajat</i>		
<i>Rasio murid sekolah</i>	<i>109,06</i>	<i>107,11</i>
<i>Rasio murid guru</i>	<i>10,04</i>	<i>10,40</i>
<i>Tingkat SLTP sederajat</i>		
<i>Rasio murid sekolah</i>	<i>142,57</i>	<i>143,21</i>
<i>Rasio murid guru</i>	<i>9,92</i>	<i>9,81</i>
<i>Tingkat SLTA sederajat</i>		
<i>Rasio murid sekolah</i>	<i>188,24</i>	<i>210,69</i>
<i>Rasio murid guru</i>	<i>9,36</i>	<i>12,93</i>

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2019

Dikarenakan data jumlah kelas menurut jenjang pendidikan belum tersedia secara menyeluruh, maka data rasio murid kelas tidak dapat tersedia pula, tetapi data rasio murid sekolah dapat kami tampilkan. Menurut Tabel 4.1 rasio murid guru untuk jenjang sekolah

dasar sederajat di Kabupaten Bondowoso tahun 2018 adalah 1 berbanding 10,40. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap 1 orang guru SD sederajat mengajar rata-rata sebabnanyak 10-11 murid. Rasio murid guru untuk jenjang SLTP sederajat sebesar 1 banding 9,81, sedangkan rasio untuk jenjang SLTA (1 : 12,93). Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap 1 orang guru SMP sederajat mengajar rata-rata sebabnanyak 9-10 murid, sedangkan untuk SMA sederajat mengajar rata-rata sebabnanyak 12-13 murid. Untuk rasio murid sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula rasionya. Adapun rasio murid sekolah jenjang SD sederajat pada tahun 2018 mencapai 1 berbanding 107,11, untuk jenjang SLTP sederajat mencapai 1 berbanding 143,21 dan untuk jenjang SLTA sederajat mencapai 1 banding 210,69.

4.2 Partisipasi Sekolah

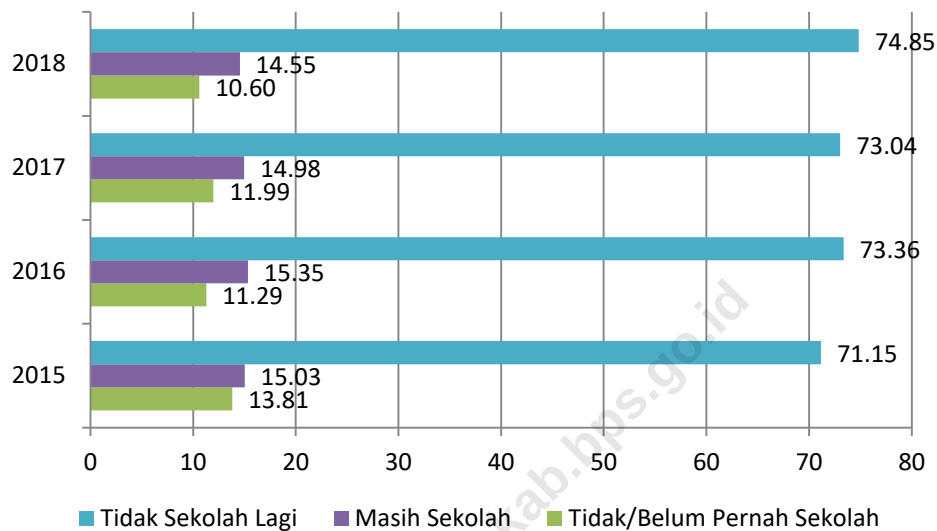
Dalam hal partisipasi sekolah, dapat dikatakan bahwa mereka yang mempunyai pendapatan tinggi memiliki kemungkinan/peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang mempunyai pendapatan rendah, kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian dari sudut sosial ekonomi, tingkat pendidikan seseorang merefleksikan tingkat kesejahteraannya.

Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat dan juga keluarga. Banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan indikator tersedianya tenaga terdidik atau sumber daya manusia terdidik yang tersedia saat ini. Besaran ini ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang berasal dari hasil Susenas, diantaranya menyajikan persentase partisipasi bersekolah yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Grafik 4.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 persentase penduduk Kabupaten Bondowoso usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Begitupun persentase penduduk yang masih sekolah mengalami penurunan, yaitu dari 15,03 persen di tahun 2015 menjadi hanya sebesar 14,55 persen di tahun 2018. Konsekuensinya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi meningkat, yaitu dari 71,15 persen di tahun 2015 naik menjadi 74,85 persen di tahun

2018. Hal ini dimungkinkan karena masih terjadinya putus sekolah atau tidak berlanjutnya sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya dari jenjang SLTP sederajat ke SLTA sederajat.

Grafik 4.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas



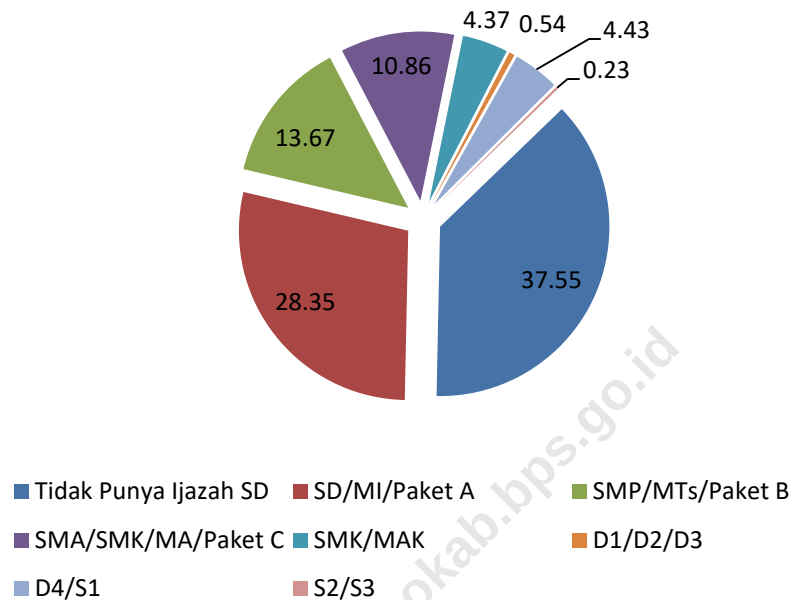
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

4.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Bondowoso tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kabupaten Bondowoso usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 37,55 persen dan hanya tamat Sekolah Dasar (SD) sederajat mencapai 28,35 persen. Untuk penduduk 15 tahun ke atas yang pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sederajat mencapai 13,67 persen. Dengan demikian, sebanyak 79,57 persen penduduk Kabupaten Bondowoso usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP sederajat ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SMA ke atas hanya 15,23 persen, sedangkan tamat diploma/sarjana hanya sebesar 5,20 persen.

**Grafik 4.2 Persentase Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Bondowoso 2018**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

4.4 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Secara harfiah, angka melek huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Latin/Arab/Braile.

Angka Melek Huruf diperoleh dengan membagi banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Persentase penduduk yang dapat baca tulis di kabupaten Bondowoso tahun 2018 menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 adalah sebesar 81,59 persen dan sebanyak 18,41 persen masih belum bisa baca tulis (buta huruf

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018

Dapat Baca Tulis Huruf	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Latin/Arab/Lainnya	87,59	79,57	83,46
Tidak Bisa	12,41	20,43	16,54

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kemampuan membaca/menulis huruf latin, arab atau lainnya, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibanding perempuan. Penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang sudah melek huruf sebanyak 87,59 persen, sementara penduduk perempuan baru 79,57 persen. Dengan kata lain penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas yang masih buta huruf hanya 12,41 persen sedangkan penduduk perempuan yang buta huruf mencapai 20,43 persen. Tingginya angka buta huruf penduduk perempuan dimungkinkan adalah penduduk yang berusia lanjut, karena pada masa lalu pendidikan bagi kaum laki-laki lebih diutamakan dibanding perempuan.

4.5 Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah

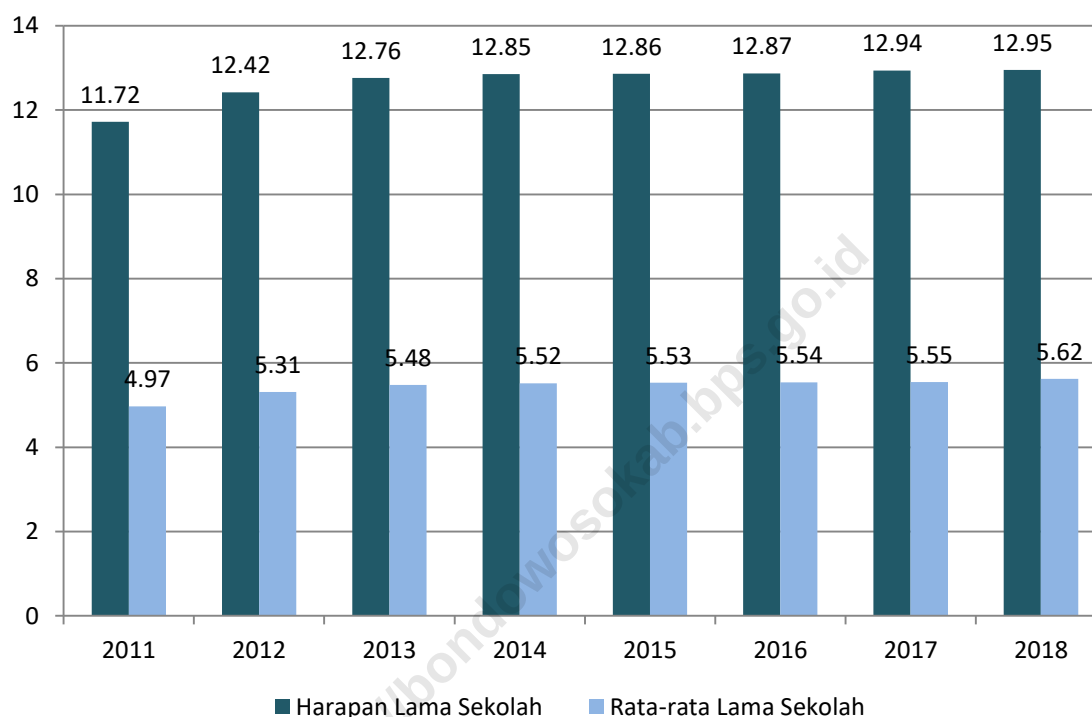
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang

HLS digunakan sebagai salah satu variabel ukuran dalam aspek pendidikan untuk penghitungan IPM, yaitu untuk menghitung Indeks Pendidikan, yang sebelumnya menggunakan variabel Angka Melek Huruf (AMH). AMH sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu BPS mengganti ukuran AMH dengan ukuran HLS untuk penghitungan Indeks Pendidikan.

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso sebesar 11,72 tahun kemudian terus

mengalami peningkatan menjadi 12,95 tahun pada tahun 2018. Ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

**Grafik 4.3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso 2018

Terbatasnya anggaran pendidikan dari pemerintah seringkali menjadi dilema, target pencapaian rata-rata lama bersekolah penduduk harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua rumah tangga mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga pendidikan tinggi, semakin mahal biaya sekolah menyebabkan sebagian orangtua terpaksa memutuskan kelangsungan sekolah anak-anaknya dan diarahkan membantu ekonomi keluarga.

Sejalan dengan angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, meskipun baru pada taraf pendidikan SD. Berdasarkan grafik 4.3 rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso tahun 2018 sebesar 5,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Bondowoso usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas 5 (Sekolah Dasar).

4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Secara umum, APS Bondowoso per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada tabel 4.2. APS kelompok usia 7-12 tahun Bondowoso tahun 2018 sebesar 99,58 yang berarti bahwa 99,58 persen penduduk Bondowoso usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa) memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun Bondowoso tahun 2018 sebesar 96,49 lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Bondowoso usia 13-15 tahun sebanyak 96,49 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Bondowoso tahun 2018 sebesar 70,86 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 28,34 persen penduduk Bondowoso usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SLTA

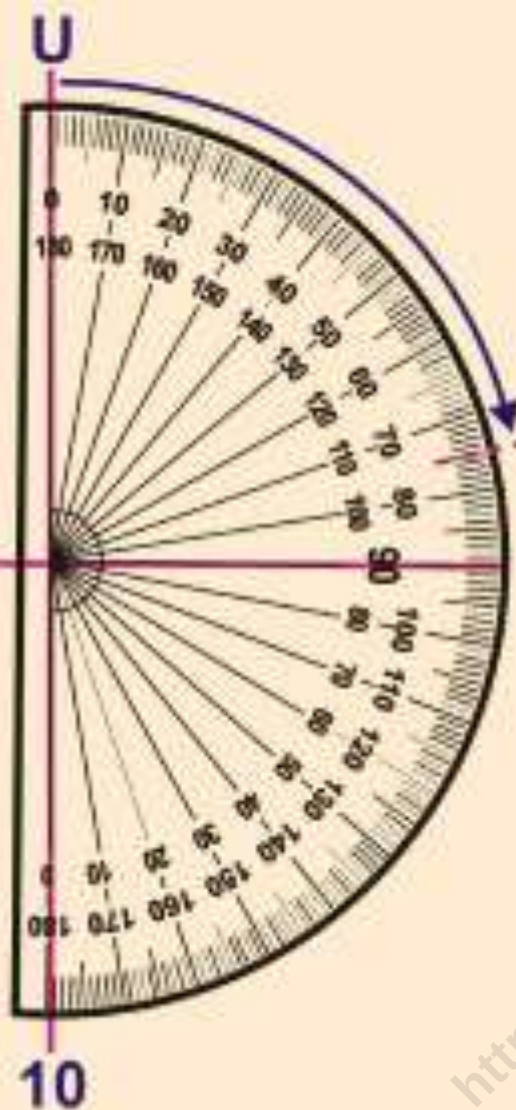
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Partisipasi Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (%)

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	0,42	99,58	0,00
13-15	0,00	96,49	3,51
16-18	0,80	70,86	28,34
19-24	0,00	13,85	86,15

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Dari tabel diatas dapat dapat dilihat banyaknya penduduk pada kelompok umur 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah lagi mencapai 3,51 persen. Dan lebih dari sepertiga atau sekitar 28,34 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi. Bahkan untuk kelompok umur 19-24 tahun tercatat sebanyak 86,15 persen penduduknya sudah tidak bersekolah lagi.

<https://bondowosokab.bps.go.id>



BAB 5

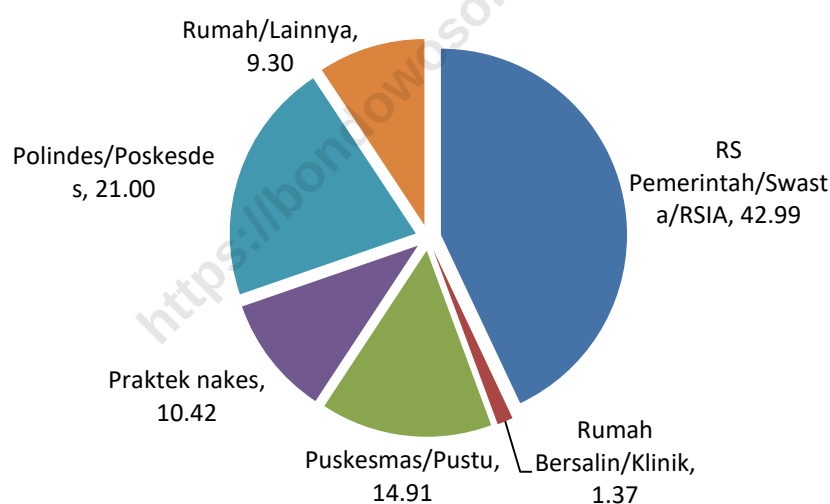
<https://bondowoskab.go.id>

BAB 5

BALITA

Perkembangan anak pada masa balita akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang saat mereka tumbuh menjadi manusia dewasa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan balita dimulai dari kesehatan ibu, tenaga penolong pada saat lahir, pemberian ASI dan imunisasi. Keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan selalu berkaitan dengan penolong persalinan yang membantu proses kelahiran tersebut. Dalam proses kelahiran penolong terbaik kelahiran adalah tenaga medis (dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lain) atau orang yang sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan persalinan.

Grafik 5.1.
Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Sebelum 2 Tahun yang Lalu, 2018

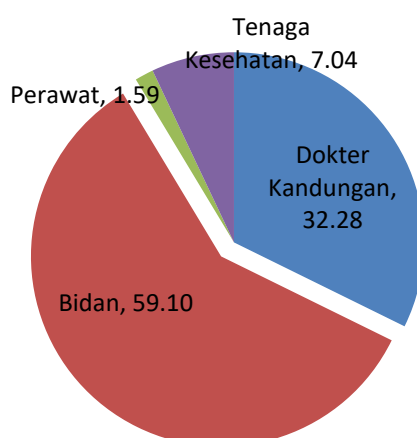


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Berdasar grafik 5.1 Hasil Susenas 2018 diperoleh gambaran sebanyak 42,99 persen perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun melahirkan di RS Pemerintah/Swasta/RSIA, khususnya pada kelahiran anak lahir hidup terakhir sebelum 2 tahun yang lalu. Sebanyak 21,00 persen melahirkan di Polindes/Poskesdes; 14,91 persen lainnya melahirkan di Puskesmas/Pustu; 10,42 persen melahirkan di Praktek Nakes; 9,30 persen melahirkan di rumah/lainnya; dan 1,37 persen melahirkan di Rumah Bersalin/Klinik.

Grafik 5.2.

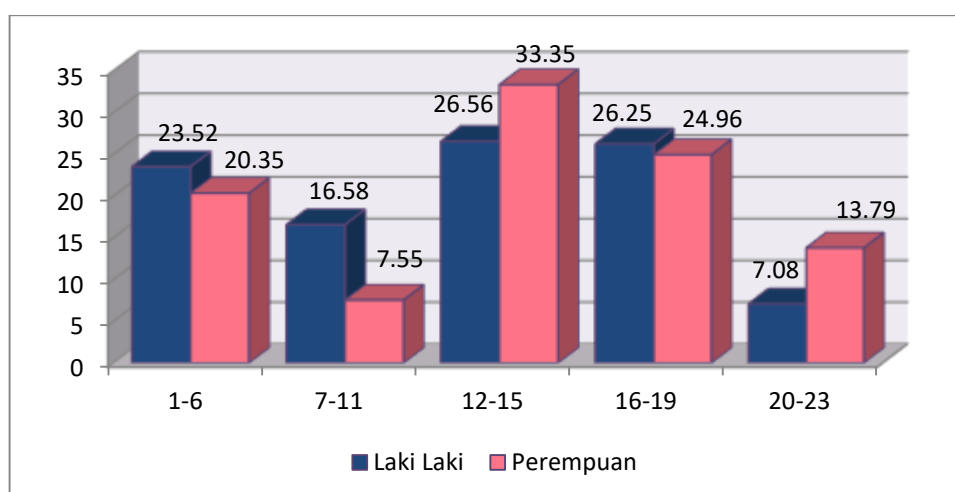
Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun dan Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir, 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Grafik 5.2 memperlihatkan persentase penolong kelahiran terakhir pada anak lahir terakhir yang dialami perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun. Dan ternyata sebanyak 59,10 persen diantaranya ditolong oleh bidan; 32,28 persen oleh dokter kandungan; 7,04 persen oleh tenaga kesehatan; dan 1,59 persen oleh perawat.

Grafik 5.3
Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) di Bondowoso Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Pemberian ASI, 2017



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2017

Air susu ibu (disingkat ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu pertama yang keluar disebut kolostrum atau jolong dan mengandung banyak immunoglobulin IgA yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit. Pemberian ASI pada bayi sangat diperlukan, karena ASI merupakan sumber makanan utama yang murah dan terbaik serta memenuhi kebutuhan gizi dan mengandung zat yang memberikan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit ringan. Selain itu, pemberian ASI juga sebagai sarana paling efektif untuk mempererat hubungan lahir-batin antara ibu dan anak. Kualitas dan kuantitas ASI yang diberikan pada bayi sangat berkaitan dengan asupan gizi makanan yang dikonsumsi oleh ibu, terutama saat ibu hamil dan setelah melahirkan (masa menyusui). ASI sebenarnya memang langsung dikenalkan pada bayi mulai saat lahir, proses ini disebut dengan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).

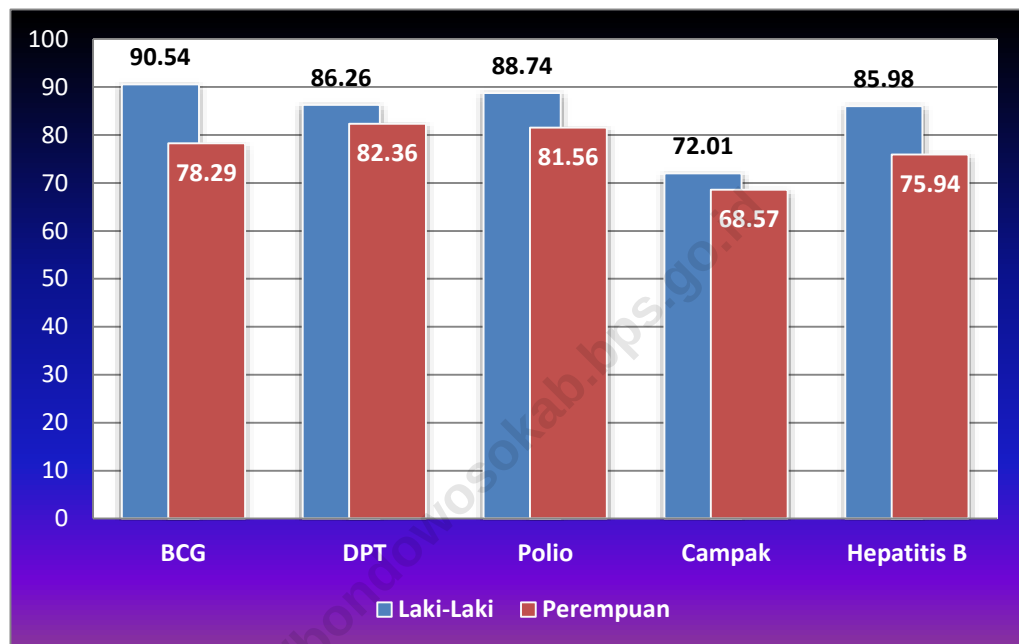
Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2017 di Kabupaten Bondowoso terdapat 26,56 persen anak laki laki dan 33,35 persen anak perempuan usia 0-23 bulan yang mendapatkan ASI selama 12 hingga 15 bulan. Sedangkan sebanyak 23,52 persen anak laki laki dan 20,35 persen anak perempuan usia 0-23 bulan hanya mendapatkan ASI selama 6 bulan atau kurang dari itu. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada grafik 5.3 di atas.

Hal yang tak kalah penting dalam melindungi balita pada masa tumbuh kembangnya dan menjaga kesehatannya hingga dewasa adalah pemberian Imunisasi. Imunisasi merupakan prosedur pencegahan penyakit menular yang diberikan kepada anak sejak masih bayi hingga remaja. Melalui program ini, tubuh diperkenalkan dengan bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang sistem imun guna membentuk antibodi. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi berguna untuk melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme tersebut di masa yang akan datang. Inilah yang disebut dengan kekebalan aktif.

Bayi yang baru lahir memang telah memiliki antibodi dari ibunya yang diterima saat masih di dalam kandungan. Namun kekebalan ini hanya dapat bertahan hingga beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu bayi akan rentan terhadap berbagai jenis penyakit dan perlu mulai memproduksi antibodinya sendiri. Dengan imunisasi, sistem kekebalan tubuh anak akan siap untuk menghadapi penyakit menular tertentu di masa depan, sesuai dengan

jenis vaksin yang diberikan. Karena imunisasi secara tepat pada balita dapat bermanfaat dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sehingga melalui imunisasi diharapkan dapat menurunkan jumlah kematian bayi dan balita.

Grafik 5.4
Persentase Balita di Bondowoso Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi yang Didapatkan, 2017



Dari gambaran di atas terlihat bahwa balita berjenis kelamin laki laki lebih baik dalam mendapat imunisasi dibandingkan balita berjenis kelamin perempuan. Sebagai contoh untuk imunisasi BCG, sebanyak 90,54 persen balita laki-laki telah mendapatkan imunisasi tersebut, sedangkan persentase balita perempuan hanya mencapai angka 78,29 persen. Begitu pula pada ke 4 jenis imunisasi lainnya.

Cakupan pemberian imunisasi balita di Kabupaten Bondowoso tahun 2017 minimal mencapai 75 persen baik untuk balita berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, kecuali untuk imunisasi campak yang masih kurang dari 75 persen.

BAB 6

PERUMAHAN

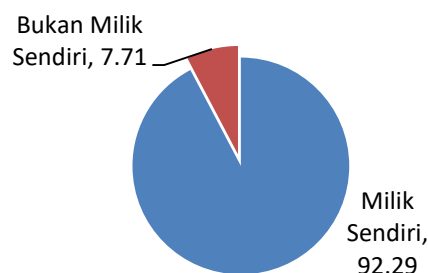
Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan relatif sulit pemecahannya karena berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kemampuan masyarakat yang terbatas dan pembiayaan pembangunan perumahan yang cukup besar.

Program pemerintah yang menyangkut bidang perumahan terus ditingkatkan, bukan hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi kualitas dan harga yang terjangkau. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang pesat menjadikan kebutuhan rumah semakin meningkat pula. Sementara luas wilayah daratan tak bisa bertambah, maka pembukaan lahan untuk kepentingan pemukiman harus tetap mempertimbangkan faktor keamanan bagi semua pihak. Lahan pertanian yang disulap menjadi daerah permukiman tentu akan berakibat berkurangnya produksi pangan yang bisa dihasilkan oleh lahan tersebut. Belum lagi lahan produktif yang diubah fungsinya menjadi industri atau infrastruktur akan menyita sumber daya air dalam tanah.

6.1. Status Kepemilikan dan Keterangan Bangunan Tempat Tinggal

Tempat tinggal di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018, sebagian besar berstatus milik sendiri atau sebesar 92,29 persen. Persentase rumah tangga dengan status rumah bukan milik sendiri (rumah dinas, rumah adat, dll) sebesar 7,71 persen.

Grafik 6.1. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso
Menurut Status Rumah Yang Ditempati, 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2018

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso
Menurut Jenis Atap, Dinding dan Lantai Terluas, 2018

Keterangan Bangunan	Persentase
(1)	(2)
❖ Jenis Atap Terluas	
Asbes, Seng	2,72
Beton	0,38
Genteng (Keramik,Metal,Tanah Liat)	96,90
❖ Jenis Dinding Terluas	
Tembok	65,79
Plesteran Anyaman Bambu	0,67
Kayu/Batang Kayu	13,47
Bambu/Anyaman Bambu	17,86
Lainnya	2,20
❖ Jenis Lantai Terluas	
Bukan Tanah	84,90
Tanah	15,10

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Jenis atap terluas masih didominasi atap Genteng dengan persentase 96,90 persen diikuti atap berjenis lainnya. Sedangkan jenis dinding terluas masih didominasi oleh jenis dinding tembok sebesar 65,79 persen. Jenis lantai terluas didominasi dengan lantai bukan tanah sebesar 84,90 persen sedangkan lantai tanah hanya sebesar 15,10 persen.

6.2. Keterangan Sumber Air Minum

Sumber air minum yang paling banyak dipakai warga adalah menggunakan sumber mata air terlindung sebesar 28,33 persen dan sumur terlindung sebesar 26,56 persen. Masih kurangnya pengguna sumber air minum ledeng baik meteran maupun eceran dan juga pengguna sumur sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan pemerintah setempat untuk peningkatan layanan air bersih untuk warga setempat.

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso
Menurut Sumber Air Minum, 2018

Sumber Air	Persentase
(1)	(2)
❖ Sumber Air Minum	
Air Kemasan Bermerk	1,84
Air Isi Ulang	1,81
Leding	14,61
Sumur Bor	20,60
Sumur Terlindung	26,56
Sumur Tak Terlindung	2,64
Mata Air Terlindung	28,33
Mata Air Tak Terlindung	3,61

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

6.3. Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Sumber penerangan yang digunakan warga sebesar 100,00 persen adalah menggunakan listrik PLN. Penggunaan Elpiji 3 Kg untuk bahan bakar sangat memasak yaitu sebesar 53,61 persen, pengguna kayu bakar sebesar 44,58 persen menempati urutan yang kedua karena wilayah Bondowoso banyak hutan.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso
Menurut Sumber Penerangan, 2018

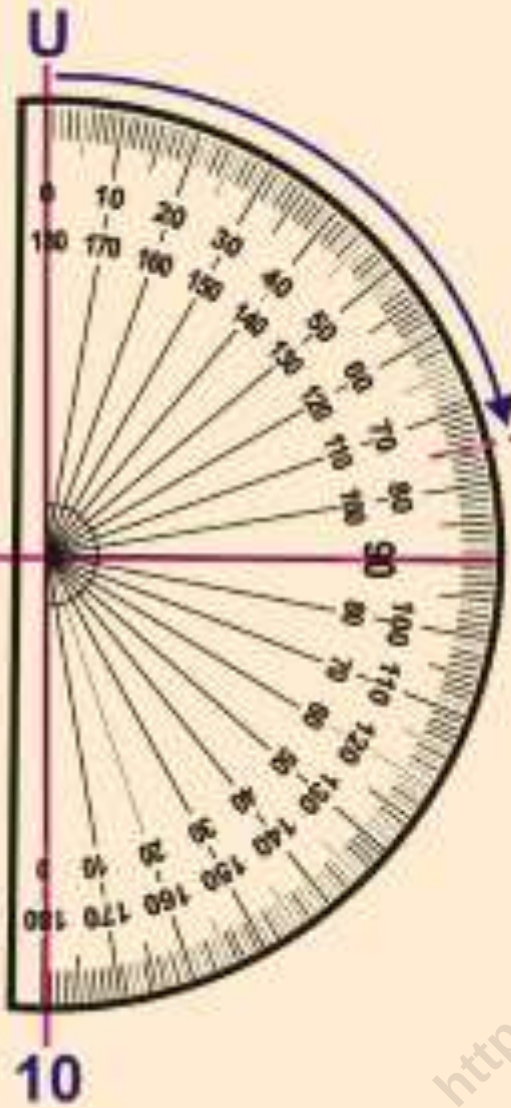
Sumber Penerangan	Persentase
(1)	(2)
Listrik PLN	100,00
Listrik non PLN	0,00
Bukan Listrik	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

Tabel 6.4. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso
Menurut Jenis Bahan Bakar Utama Memasak, 2018

Bahan Bakar	Persentase
(1)	(2)
Listrik	0,22
Elpiji 5,5 Kg	0,26
Elpiji 12 Kg	0,76
Elpiji 3 Kg	53,61
Arang	0,07
Kayu Bakar	44,58
Tidak Memasak di Rumah	0,50

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018



BAB 7

<https://bondowosukab.go.id>

BAB 7

INDIKATOR LAINNYA

7.1. Pengeluaran Penduduk

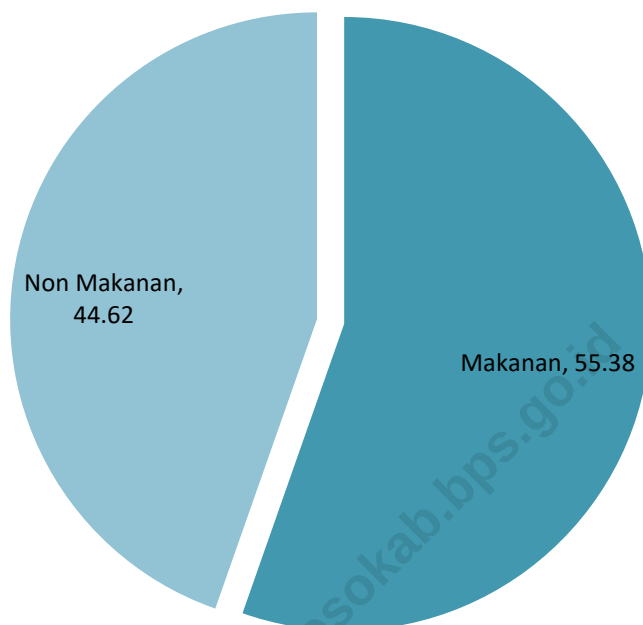
Tingkat penghasilan masyarakat di suatu wilayah dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Namun demikian sampai sejauh ini data mengenai pendapatan amat sulit didapat, terutama dalam hal keakuratan data. Oleh sebab itu untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat digunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Masyarakat Bondowoso rata-rata pengeluarannya terbesar pada makanan sebesar 55,34 persen, sedangkan pengeluaran bukan makanan sebesar 44,46 persen.

Untuk pengeluaran bahan makanan, padi-padian tetap menjadi primadona yang menduduki porsi yang terbesar yaitu 14,91 persen, sedangkan pengeluaran yang paling rendah adalah umbi-umbian hanya 0,63 persen. Masyarakat Bondowoso banyak yang lebih senang membeli makanan dan minuman jadi karena di Bondowoso sedang ada wisata kuliner Bondowoso (Wakulbo) yang menyediakan dan bisa melayani antar pesanan sampai konsumen. Terkenal masyarakat Bondowoso sangat menyukai sayur-sayuran dan ini terbukti pengeluaran sayur-sayuran mencapai 9,04 persen. Tradisi makan sirih dan kebiasaan merokok tetap tinggi terlihat dari 15,48 persen dari pengeluaran bahan makanan.

Untuk pengeluaran bukan makanan, perumahan dan fasilitas rumah tangga mendapat porsi yang cukup tinggi (52,61 persen) dibandingkan yang lain. Pengeluaran aneka barang dan jasa menduduki urutan kedua yakni sebesar 24,38 persen dari pengeluaran non makanan. Adapun pengeluaran yang paling rendah untuk pengeluaran non makanan adalah pengeluaran pajak dan asuransi.

Grafik 7.1. Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
di Kabupaten Bondowoso, 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

**Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan
di Kabupaten Bondowoso 2018**

Pengeluaran Makanan Per Kapita (Rupiah)	
Padi-Padian	53.129
Umbi-Umbian	2.391
Ikan	22.149
Daging	10.714
Telur dan Susu	17.992
Sayur-Sayuran	30.135
Kacang-Kacangan	16.970
Buah-Buahan	20.344
Minyak dan Lemak	10.455
Bahan Minuman	16.367
Bumbu-Bumbuan	8.433
Konsumsi Lainnya	6.112
Makanan & Minuman Jadi	118.465
Tembakau dan Sirih	43.262
Total Pengeluaran Makanan	376.919

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

**Tabel 7.2 Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan
di Kabupaten Bondowoso 2018**

Pengeluaran Makanan Per Kapita (Rupiah)	
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	138.414
Aneka Barang dan Jasa	71.318
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	21.162
Barang Tahan Lama	45.147
Pajak & Asuransi	17.884
Keperluan Pesta	9.803
Total Pengeluaran Bukan Makanan	303.726

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONDOWOSO*

Jl. KH Hasyim Asyari No.7 Bondowoso
Telp : (0332) 421775, Fax: (0332) 432331
Homepage: <https://bondowosokab.bps.go.id>
Email : bps3511@bps.go.id